

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu tujuan SDGs menyatakan bahwa akan membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Pembangunan juga diartikan sebagai proses perubahan sosial dengan *participatory* yang luas dalam suatu masyarakat untuk mencapai kemajuan sosial dan material termasuk bertambahnya keadilan, kebebasan, dan kualitas hidup lainnya. Paradigma pembangunan terdahulu yakni dengan dorongan motivasi pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya sering berakibat pada terabaikannya upaya pembinaan kelembagaan dan pembinaan kapasitas (*capacity building*). Penerapan gaya pembangunan demikian cenderung menghasilkan hubungan dependensi antara masyarakat dengan proyek pembangunan ataupun masyarakat dengan pemerintah. Akibat yang akan terjadi adalah penekanan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan kemampuannya dalam berperan pada pembangunan. Pembangunan yang berlangsung selama ini lebih bertujuan pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan fisik serta kurang menyentuh sisi lain kehidupan manusia, yakni aspek sosial dan politik masyarakat. Padahal secara alamiah usaha peningkatan taraf hidup masyarakat harus disertai dengan pemanfaatan sumber daya yang telah ada dalam masyarakat itu sendiri (Prasetyo, 2016).

Pembangunan permukiman menjadi persoalan yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkendali mendorong tumbuhnya permukiman baru dari satu blok ke blok lain, dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Permukiman yang tumbuh

tentunya membutuhkan ruang dan lahan sebagai lokus aktivitas kegiatan pembangunan. Akan tetapi, fenomena yang dihadapi saat ini adalah pengembangan permukiman terkadang tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur. Dengan tidak adanya keseimbangan tersebut, maka munculnya permasalahan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan produk dari pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan serta menyediakan pelayanan kota yang memadai (Cahya & Juanda 2012). Pesatnya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan sering mengalahkan kemampuan kota dalam penyediaan pelayanannya termasuk infrastruktur dan penyediaan permukiman yang layak bagi warganya, akibatnya muncul banyak lingkungan perumahan kumuh (Patrisia 2017). Pertambahan penduduk yang terjadi secara eksponensial adalah konsekuensi dari laju urbanisasi dan industrialisasi (Martokusumo 2006). Kelanjutannya adalah pertumbuhan kota dengan peningkatan tuntutan (*demand*) akan lahan dan bangunan (aset perkotaan). Dengan keterbatasan lahan (*supply*) yang ada, maka gejala kenaikan harga lahan menjadi tak terelakan. Akibatnya, muncul banyak kawasan kumuh di perkotaan sebagai solusi dari kurangnya kemampuan daya beli lahan pada masyarakat.

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor urbanisasi. Keberadaan permukiman kumuh perkotaan di negara berkembang adalah karena pertumbuhan kota yang informal, ilegal, dan tidak terencana (Uddin 2018). Pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan menimbulkan banyak konsekuensi, khususnya secara estetika dapat menimbulkan rendahnya kualitas lingkungan. Menurut Elgizawy et.al. (2016), penduduk daerah kumuh mengalami kondisi hidup yang buruk karena lingkungan dan perawatan kesehatan yang memburuk, serta tingkat buta huruf yang tinggi menyebabkan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat di tingkat nasional terutama pada ekonomi negara. Secara khusus keberadaan kawasan

permukiman kumuh perkotaan berimplikasi terhadap paradigma buruk penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya (Robichin, et.al. 2019).

Banyak tantangan dalam membangun ketahanan di daerah kumuh, tetapi ada juga peluang. Pemerintah daerah tentu sudah melakukan berbagai macam cara untuk menangani permukiman kumuh, mulai dari penataan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, sampai pada pelaksanaan teknis kegiatan. Baru-baru ini kebijakan pemerintah tentang pembangunan kota, menarik minat para lembaga-lembaga untuk mengatasi masalah perkotaan dengan menawarkan potensi advokasi untuk membangun ketahanan di daerah kumuh perkotaan (Ahmed 2014), seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pemalang. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pemalang mencapai 0,65% per tahun (Pemalang Dalam Angka, 2020). Meski tidak tergolong memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, akan tetapi persoalan permukiman sudah menjadi salah satu isu penting terutama terkait dengan banyaknya permukiman kumuh yang tersebar di berbagai kawasan kota. Pemerintah Kabupaten Pemalang berusaha melakukan pembenahan dan penataan permukiman kumuh untuk mencapai target pembangunan daerah.

Penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di wilayah Kota Pemalang dengan luasan mencapai 67,02 ha dan tersebar di Kecamatan Pemalang dengan rincian masing-masing berada di wilayah Kelurahan Mulyoharjo, Kelurahan Pelutan, dan Kelurahan Kebondalem (SK Bupati Pemalang Nomor : 188.4 /412/Tahun 2018). Rencana aksi penanganan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang telah dituangkan dalam memorandum program Rencana Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Ketiga wilayah kelurahan tersebut memiliki karakteristik aktivitas utama yang bervariasi terutama dicirikan dengan aktivitas ekonomi masyarakatnya, seperti perdagangan dan jasa, pusat perkantoran, pusat pendidikan, dan aktivitas kegiatan lain.

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh telah diamanatkan Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh, jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Lebih lanjut, dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, menyatakan bahwa penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha adalah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Jika meninjau dari lokasi penataan Kampung Gumelem dengan luasannya adalah kurang dari 10 ha, maka upaya penataan pada Kawasan Kampung Gumelem menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang dilakukan melalui proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan berdasarkan kriteria kekumuhan yang ditinjau dari kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi terhadap kebakaran.

Kampung Gumelem merupakan salah satu kawasan kumuh di Kelurahan Mulyoharjo, yang menjadi kawasan prioritas penataan skala kawasan di Kabupaten Pemalang. Kampung Gumelem memiliki luasan kurang dari 10 ha, dihuni oleh 258 KK, dengan jumlah 874 jiwa yang menempati 197 unit bangunan rumah. Pada Kampung Gumelem terdapat 42 KK yang menempati 30 unit bangunan rumah dengan bangunan tambahan yang berada di tanah milik negara dan berada di atas saluran sempadan irigasi,

serta beberapa diantaranya tergolong MBR. Kampung identik dengan suatu lingkungan masyarakat yang sudah mapan, yang terdiri dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah, serta pada umumnya tidak memiliki prasarana, utilitas, dan fasilitas sosial yang cukup baik (Patrisia 2017). Kawasan Kampung Gumelem juga sering mengalami banjir yang disebabkan oleh drainase yang tidak dapat mengalirkan air ke sungai karena terjadinya pendangkalan pada saluran drainase, baik oleh lumpur maupun sampah. Pada musim hujan, air dari saluran meluap sampai ke permukiman menimbulkan genangan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini menyebabkan kerusakan sarana prasarana dan menimbulkan kekumuhan pada lingkungan. Kondisi diperparah dengan adanya penumpukan sampah pada saluran drainase.

Sejauh ini, Kampung Gumelem telah mendapatkan beberapa bantuan program terkait penataan kawasan, seperti program KOTAKU, penataan kawasan dari bantuan anggaran hibah APBN, serta penataan dari bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten Pemalang. Secara fisik infrastruktur pada Kampung Gumelem sudah mengalami penataan skala kecil, tetapi hasilnya belum terlihat secara signifikan. Saat ini Kampung Gumelem telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas penataan di perkotaan. Kampung Gumelem merupakan satu-satunya kawasan di Kabupaten Pemalang yang mendapatkan bantuan dana penataan skala kawasan dari Bank Dunia (*World Bank*). Penataan Kampung Gumelem menggunakan konsep desain “*Green Livable*” untuk mencapai kawasan yang aman dan nyaman bagi penghuninya.

Kawasan Pusat Kota merupakan kawasan prioritas untuk dilakukan penanganan. Semakin berkembangnya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan segala aspek kehidupan yang berlangsung secara terus menerus, akan mengakibatkan kota tidak lagi dapat menampung kegiatan penduduk (Giyarsih 2001). Masalah utama pada kawasan kumuh di pusat kota adalah ketidakteraturan bangunan akibat pertumbuhan permukiman

illegal di sempadan dan di atas saluran, serta konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Kawasan ini rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh kepadatan permukiman yang tinggi, akses jalan permukiman belum memadai dan tidak sesuai persyaratan teknis, serta jaringan drainase yang belum berfungsi dengan baik. Beragam program dan kegiatan telah dilakukan, baik oleh pihak pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di kawasan perkotaan Pemalang, namun hasilnya belum terlihat secara signifikan.

Penataan kawasan kumuh perkotaan memiliki banyak kendala, salah satunya adalah pemahaman standar permukiman yang layak. Selain itu, faktor fungsional permukiman juga terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi, bahkan politik. Dewasa ini semakin disadari bahwa permasalahan yang dialami suatu daerah atau wilayah semakin rumit dan kompleks, sehingga tantangan perencanaan ke depan menjadi jauh lebih besar dibanding masa sebelumnya. Dengan minimnya solusi yang dihasilkan dalam menangani kompleksnya permasalahan yang timbul, banyak para ahli perencanaan yang mencurahkan perhatian pada suatu model pengembangan masyarakat dengan basis konsep pemberdayaan masyarakat sebagai jawaban alternatif terbaik dalam menghadapi tantangan perencanaan saat ini (Bancin, 2011). Diperlukan analisis terkait aspek modal sosial dalam program penataan kawasan kumuh.

Perbedaan konsep dan strategi implementasi program dari masing-masing dinas dan swasta terkait penataan kawasan kumuh perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Hal tersebut dilakukan guna mencapai kondisi ideal, yakni meningkatnya kemampuan sosial pada masyarakat di kawasan kumuh perkotaan. Dalam sebuah penataan diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar dapat terwujud dalam sebuah kolaborasi, yakni kerjasama operasional berbasis wilayah, maupun kerjasama berbasis sumber dari luar (Turok, 2016). Pemberdayaan masyarakat pada kawasan kumuh melalui partisipasi mereka dalam program penataan kawasan

bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengelola pendanaan pada skala mikro dan peningkatan fisik lingkungan, tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan lembaga pendamping masyarakat (Das, 2015).

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020, bahwa peran masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan serta pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Koordinasi yang kuat dari pemerintah dan sikap kooperatif masyarakat diperlukan agar upaya tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan langkah inisiatif masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah dalam program penanganan kawasan kumuh Kampung Gumelem. Pada bidang perencanaan pembangunan, modal sosial mendapat perhatian yang besar. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya pengakuan tentang arti penting aspek sosial dalam perencanaan pembangunan. Sebenarnya, sejauh ini sudah terdapat regulasi daerah yang mengatur mengenai penanganan masalah permukiman kumuh, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam regulasi tersebut telah dijelaskan mengenai tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh.

Pelaksanaan penataan kawasan kumuh selama ini telah beberapa kali dilakukan pada Kampung Gumelem, namun pada perkembangannya kualitas fisik dan lingkungannya masih belum dikatakan layak, serta masih banyak terdapat kriteria kumuh pada lingkungan. Hal ini terjadi akibat perencanaan di masa lalu yang meninggalkan beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Perencanaan di masa lalu menunjukkan penataan dilakukan hanya terfokus pada penataan fisik saja, belum ada pelibatan masyarakat baik tahap perencanaan, konstruksi, operasional, maupun pada masa pemeliharaan.
- b. Perencanaan dan kebijakan pertumpu pada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk itu diperlukan pendekatan baru berupa optimalisasi peran serta masyarakat dalam upaya penataan kawasan kumuh.
- c. Belum digalinya potensi modal sosial dalam masyarakat dalam upaya penataan kawasan.

Upaya penataan kawasan kumuh di masa lalu masih menghadapi banyak kendala, namun masih ada beberapa potensi yang dapat digali untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki dan mengatasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat, maka diperlukan beberapa perubahan, khususnya yang terkait dengan kebijakan, kelembagaan, dan mekanismenya. Penelitian ini lebih spesifik diarahkan pada bagaimana suatu kelompok masyarakat dapat membentuk dan memelihara modal sosial dan partisipasi masyarakat sebagai aset kolektif dan bagaimana aset kolektif tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama pada penanganan lingkungan permukiman setelah dilakukannya penataan pada Kampung Gumelem.

1.2. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Paradigma pembangunan saat ini telah bergeser ke arah pembangunan dengan menjunjung pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Isu pembangunan partisipatif telah mendapatkan perhatian. Paradigma baru dalam pembangunan sangat diperlukan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Pembangunan dengan mengedepankan pendekatan partisipatif menjadi suatu kunci perubahan kebijakan penataan kawasan kumuh. Pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat dalam upaya penataan kawasan kumuh merupakan suatu pembagian tugas dan

tanggungjawab dengan pemerintah untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih baik.

Di beberapa wilayah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurun akibat memudarnya sejumlah lembaga masyarakat yang dahulu hidup sebagai akibat dari intervensi pemerintah yang terlalu jauh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Faktor lain penyebab kegagalan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yakni kurangnya pemanfaatan modal sosial dalam pelaksanaan program pembangunan maupun pemberdayaan. Modal sosial secara sederhana dapat dilihat sebagai kemampuan masyarakat untuk mengkoordinir diri sendiri dalam memperjuangkan tujuan-tujuan mereka. Apabila diberikan ruang dan peluang yang cukup baik dalam optimalisasi program pembangunan maka akan terbangun sinergitas program dan modal sosial yang ada, sehingga tercapai hasil penataan kawasan yang lebih baik dan maksimal.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kumuh di beberapa wilayah perkotaan Kabupaten Pemalang, di antaranya adalah dengan mengalokasikan anggaran daerah untuk pembangunan dan penataan kawasan kumuh perkotaan, yakni di Kampung Gumelem. Kampung Gumelem berada pada wilayah administrasi Kelurahan Mulyoharjo. Kampung Gumelem telah beberapa kali mendapat bantuan program penataan lingkungan, baik oleh pemerintah maupun swasta, namun hasilnya belum terlihat secara maksimal. Kondisi lingkungan masih belum dikatakan layak, masih ada beberapa bangunan yang berdiri di atas saluran air, terjadi genangan air saat hujan hingga merusak infrastruktur jalan dan bangunan yang ada, sampah rumah tangga yang belum terkelola, dan masih buruknya sanitasi masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pemahaman masyarakat setempat yang menganggap lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah. Sejauh ini, belum dilakukan sosialisasi secara masif mengenai bagaimana masyarakat harus bersikap terhadap lingkungannya.

Untuk mendukung keberhasilan program penataan kawasan agar mencapai lingkungan bebas kumuh, diperlukan upaya bersama untuk

menjaga dan mempertahankan lingkungan yang telah dibangun. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan perencanaan partisipatif dan penguatan modal sosial dalam program penataan kawasan kumuh. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengindikasikan tujuan dari suatu pembangunan yakni untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari kegiatan pembangunan itu sendiri. Dengan mengetahui perencanaan partisipatif dan potensi modal sosial, masyarakat diharapkan dapat menemukan cara untuk menjaga dan mempertahankan lingkungan yang telah dibangun sesuai dengan karakter masyarakat setempat. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat modal sosial masyarakat Kampung Gumelem?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penataan kawasan kumuh Kampung Gumelem ?
3. Bagaimana strategi yang paling tepat dalam penataan lingkungan kumuh Kampung Gumelem berdasarkan potensi modal sosial dan tingkat partisipasi masyarakat?

1.3. TUJUAN DAN SASARAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat modal sosial masyarakat Kampung Gumelem dengan cara menilai modal sosial dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman kumuh Kampung Gumelem, agar nantinya dapat merumuskan strategi yang paling tepat untuk menjaga dan mempertahankan lingkungan yang telah dibangun dengan berbasis karakteristik sosial masyarakat. Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian maka disusunlah sasaran penelitian.

1.3.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka sasaran-sasaran penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut :

- a. Menganalisis tingkat modal sosial pada masyarakat Kampung Gumelem
- b. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya penataan kawasan kumuh Kampung Gumelem
- c. Menganalisis strategi yang tepat dalam penataan lingkungan kumuh Kampung Gumelem berdasarkan potensi modal sosial dan tingkat partisipasi masyarakat.

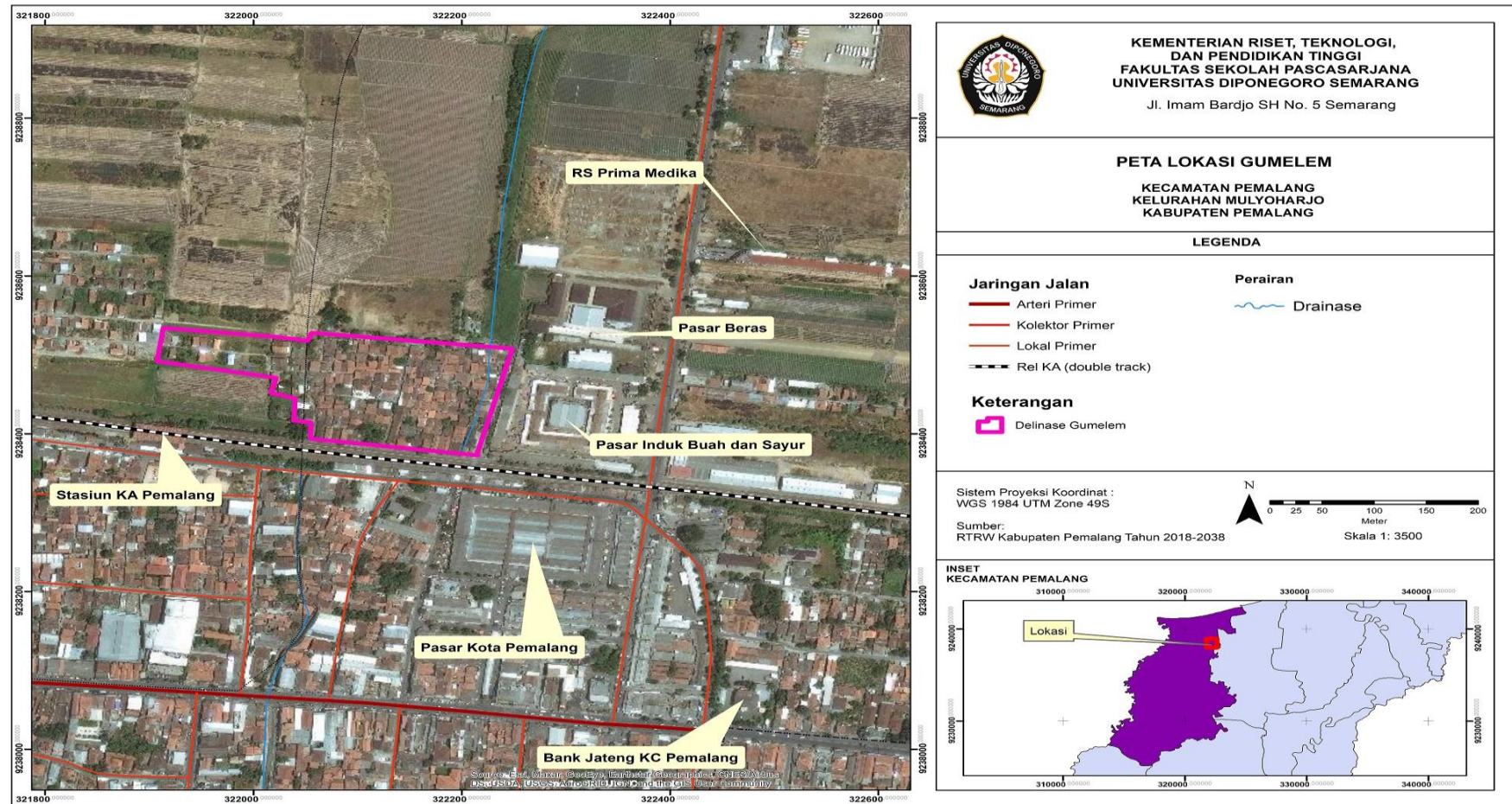
1.4. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah menjelaskan lokasi penelitian beserta batas-batasnya, sedangkan ruang lingkup substansi menjelaskan mengenai objek yang akan diteliti dan analisis yang dilakukan.

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Kampung Gumelem terletak pada wilayah administrasi Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kampung Gumelem terletak pada pusat kota Pemalang dan berbatasan langsung dengan kompleks pasar Kota Pemalang, serta Stasiun Pemalang. Lokasi Kampung Gumelem juga dekat dengan Terminal Induk Kota Pemalang dan dekat dengan Jalan Raya Nasional Pantai Utara (Pantura). Ruang lingkup wilayah penelitian berada pada RT 001, RT 002, RT 003, yang kesemuanya masuk pada wilayah administrasi RW 001, Kelurahan Mulyoharjo.

Sekolah Pascasarjana



Gambar 1. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Sekolah Pascasarjana

1.4.2. Ruang Lingkup Subtansi

Penelitian ini membahas teori-teori yang digunakan dalam menemukan sasaran yang telah ditentukan. Teori-teori tersebut meliputi Teori Perencanaan Pembangunan, Teori Permukiman Kumuh, Teori Partisipasi Masyarakat, dan Teori Modal Sosial. Penelitian ini terlebih dahulu menilai potensi modal sosial masyarakat dan menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh. Penilaian tersebut dilakukan guna mengetahui strategi penanganan penataan lingkungan kumuh yang tepat dengan berdasarkan potensi modal sosial dan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga akan membahas mengenai karakteristik sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat Kampung Gumelem.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi *stakeholder* pemerintah dan masyarakat Kampung Gumelem Kabupaten Pemalang, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah pusat/ Kementerian PUPR, sebagai bahan kajian dalam mempertimbangkan kebijakan terkait penyelenggaraan program penataan permukiman kumuh di daerah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, sebagai bahan referensi atau rujukan dalam melaksanakan program penataan kawasan dengan berbasis masyarakat
- c. Bagi masyarakat, sebagai masukan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program penataan lingkungan
- d. Bagi akademisi, sebagai rujukan dan *lesson learned* berkaitan dengan fenomena penataan lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan.

1.6. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran terkait topik penataan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Pemalang, belum terdapat penelitian pada lokasi tersebut. Akan tetapi, penelitian dengan tema sejenis sudah banyak dilakukan. Berikut merupakan penelitian sejenis yang dimaksud.

Tabel 1. Daftar Penelitian Sejenis

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1.	Penguatan Kemampuan Sosial Pada Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan (Studi Kasus Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi) ditulis oleh Yudha P Heston dan Ahmad Yusuf A, Tahun 2013 pada Jurnal Tata Loka dengan biro penerbit Planologi Undip.	Keberhasilan penguatan sosial pada penataan daerah kumuh perkotaan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dan komunitas masyarakat. Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dapat dilakukan dengan mendorong pimpinan daerah untuk berkomitmen menetapkan kawasan prioritas dalam meningkatkan kualitas sosial wilayah, membentuk unit kerja pengelola kawasan yang mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas sosial pada penataan kawasan kumuh. Sedangkan peningkatan tata kelola masyarakat dapat dilakukan dengan pemberian komitmen warga, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, pengawasan dan kontribusi peningkatan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh yang menjadi prioritas.	Kebaharuan terletak pada hasil penelitian bahwa keberhasilan penguatan sosial pada penataan daerah kumuh perkotaan sangat bergantung pada kolaborasi kapasitas pemerintah dan masyarakat. Pada beberapa penelitian analisis mengenai keberhasilan penataan kawasan kumuh lebih berbasis pada partisipasi masyarakat.
2.	<i>Slums As A Result Of Urbanization</i> Jurnal ditulis oleh Y V Simorangkir, S Octavia dan H S Raubaba, pada <i>Conf. Series: Earth and Environmental Science</i> 343 Tahun 2019	Solusi untuk mengatasi permukiman kumuh perkotaan pada Perumahan Kaliweda adalah dengan cara menata ulang perumahan, melegalisasi tanah dan peremajaan permukiman.	Terletak pada hasil penelitian menunjukan bahwa untuk menganalisis solusi permasalahan permukiman kumuh dengan cara menata ulang perumahan, melegalisasi tanah dan peremajaan permukiman. Kebaharuan dari hasil penelitian ini yakni perlunya upaya legalisasi tanah untuk menata permukiman kumuh, hal tersebut jarang ditemui pada penelitian

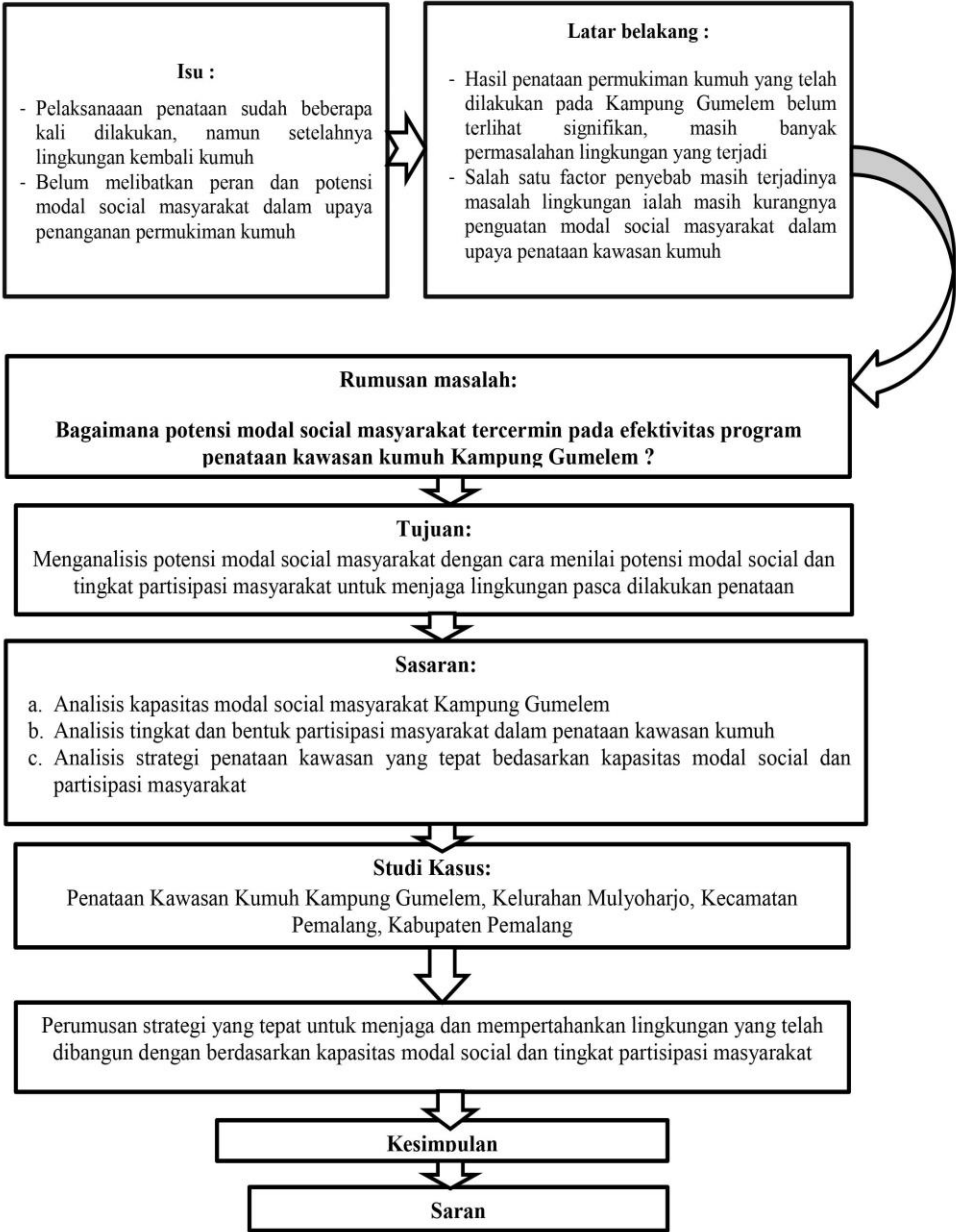
			sejenis karena dirasa sulit untuk terealisasi.
3.	<i>Adaptive Neighborhoods: The Interrelation of Urban form, Social Capital, and Responses to Coastal Hazards in Jakarta</i> ditulis oleh Lisa-Michele Bott, Leda Ankel, dan Boris Braun, pada Jurnal Geoforum tahun 2019	Ikatan modal sosial masyarakat perkotaan pesisir Jakarta sudah bisa memfasilitasi dan membentuk 'lingkungan responsif' jangka menengah. Kegiatan sosial dapat memupuk keterikatan pada lingkungan dan masyarakatnya. Namun tidak ada temuan yang menunjukkan bahwa wilayah perkotaan di pesisir Jakarta dapat mendukung pembentukan 'lingkungan adaptif' dalam jangka panjang. Lingkungan yang adaptif nantinya dibutuhkan untuk menghubungkan dengan wilayah lain.	Terletak pada hasil penelitian yakni membahas mengenai lingkungan responsive dan lingkungan adaptif. Tentu saja modal sosial jika dimanfaatkan untuk membangun lingkungan responsive dan lingkungan adaptif sangat baik digunakan, namun belum tentu bisa terlaksana dalam jangka panjang.
4.	<i>Relationship Between the Dynamics of Social Capital and The Dynamics of Residential Satisfaction Under The Impact of Urban Renewal</i> ditulis oleh Tongyun Du, Ningshuang Zeng, Yinxuan Huang dan Henrik Vejre pada Jurnal Cities, Tahun 2020.	Modal sosial dan kepuasan tinggal dapat diukur dengan perubahan yang dirasakan secara subjektif oleh penduduk. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat variabel baru yang disebut sebagai “dinamika penggusuran dan perubahan sosial budaya”. Modal sosial berkorelasi positif dengan kepuasan lingkungan tempat tinggal. Dinamika sosial yang paling menonjol yakni kepercayaan dan rasa timbal balik antar anggota masyarakat.	Kebaharuan terletak pada hasil penelitian bahwa pada penelitian sejenis modal sosial bukan satu-satunya tolak ukur dalam penilaian kepuasan lingkungan tempat tinggal. Faktor yang biasanya mendominasi penilaian kepuasan lingkungan tempat tinggal ialah Faktor fisik bangunan dan ketersediaan sarana prasarana umum.
5.	<i>The Quest for A Sustainable Spatial Planning Framework in Zimbabwe and Zambia</i> ditulis oleh Andrew Chigudu dan Innocet Chirisa pada Jurnal Land Use Policy, Tahun 2020.	Hasil penelitian menunjukan penataan ruang tidak hanya mengacu pada aspek fisik tanah saja melainkan juga pada aspek kemasyarakatan seperti kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial. Kerangka perencanaan tata ruang pada sebuah	Kebaharuan penelitian terletak pada konsep yang dihasilkan dari penelitian, yakni penataan ruang harus juga memperhatikan aspek kelembagaan dan hukum. Pada penelitian sejenis yang lain umumnya faktor yang menjadikan fokus pada penataan ruang ialah ekonomi, sosial dan lingkungan.

		perumusan pembangunan sangat dibutuhkan. Studi menunjukkan bagaimana perubahan dalam kerangka kelembagaan dan hukum memengaruhi pembangunan di sektor ekonomi mendorong perencanaan pembangunan berkelanjutan tanpa mengabaikan sektor lain. Untuk mencapai penataan ruang yang berkelanjutan perlu adanya perencanaan kerangka acuan tata ruang yang berkelanjutan. Kerangka perencanaan tata ruang yang berkelanjutan juga mengontrol dan mendorong pembangunan tata ruang di kedua wilayah yakni Zimbabwe dan Zambia. Kelembagaan dan hukum yang memandu perencanaan tata ruang harus berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang	
6.	Tesis berjudul “Pengaruh Modal Sosial Dalam Tingkat Keberhasilan Pembangunan Jalan Desa yang Berbasis Partisipasi masyarakat (Studi Kasus: Pembangunan Jalan Desa di Desa Dadu dan Sendangagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan) yang ditulis oleh Sumarhadi Prastyo pada Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Tahun 2016	Hasil Penelitian menunjukan bahwa setidaknya ada beberapa analisa permasalahan, yaitu : pertama, modal sosial yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong telah dimanfaatkan dalam program pembangunan jalan desa. Kedua, perencanaan dari bawah dalam arti sebenarnya yang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat menjamin keberhasilan proses pembangunan. Peran aktor/ tokoh masyarakat sangat mewarnai proses pembangunan desa. Ketiga, pembangunan	Kebaharuan: Dari hasil penelitian menyarankan untuk menyusun kembali desain mekanisme pelaksanaan perencanaan partisipatif yang ada sehingga memberikan peluang dan jaminan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan program pembangunan yang bertumpu pada penggalian kebutuhan nyata masyarakat. Pendampingan (fasilitasi) kepada masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas diperlukan agar terjadi percepatan pelaksanaan perencanaan partisipatif.

		jalan desa dengan sumber dari dana desa bila ditinjau dari skala/jenjang partisipasi, maka dapat dikemukakan partisipasi yang telah dilakukan di lokasi penelitian termasuk <i>delegated Power</i>, sedangkan program bantuan aspal dari pemkab masuk dalam <i>partnership</i>. Keempat, keberhasilan proses pembangunan jalan desa ditentukan oleh 5 faktor yaitu kelembagaan, teknologi/teknik, lingkungan, pembiayaan serta sosial budaya.	
7	Tesis berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makasar” yang ditulis oleh Ikram Mubarak Djodding pada Program Studi Perencanaan Pengembanan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanudin Makasar, Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri menunjukkan partisipasi yang sangat aktif. Faktor pendorong partisipasi masyarakat antara lain kemauan, kemampuan, status kepemilikan lahan, hubungan interaksi antarwarga dan eratnya rasa persatuan. Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat antara lain sarana dan prasana yang kurang memadai, kurangnya dukungan pemerintah dan keterbatasan waktu.	Kebaruan : terletak pada hasil penelitian. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat hasilnya cukup lengkap, peneliti membuktikan bahwa salah satu Faktor penghambat partisipasi ialah kurangnya dukungan pemerintah. Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti tentang peran pemerintah yang terlalu mengintervensi masyarakat dalam sebuah program penataan.

1.7. KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Kerangka pikir merupakan alur penelitian dari awal latar belakang yang memunculkan permasalahan penelitian lalu didapatkan pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan tersebut, maka didapatkan tujuan penelitian sehingga dapat diketahui analisis apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai hasil penelitian seperti karakteristik sosial ekonomi, karakteristik lingkungan, dan fisik bangunan serta potensi modal sosial dan partisipasi masyarakat Kampung Gumelem.



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian